

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Rumah Zakat Indonesia

Rumah Zakat Indonesia merupakan sebuah lembaga swadaya masyarakat yang memfokuskan pada pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf secara lebih professional dengan menitikberatkan program, pendidikan, kesehatan, pembinaan komunitas dan pemberdayaan ekonomi sebagai penyaluran program unggulan.

Sebagai salah satu Organisasi Pengelola Zakat yang terus mengalami peningkatan dan perkembangan, saat ini Rumah Zakat Indonesia telah memiliki 44 jaringan kantor di 34 kota besar di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Rumah Zakat Indonesia mengembangkan empat rumpun program sebagai bentuk profesionalitas dan keamanan, yaitu *Healthcare*, *EduCare*, *EcoCare*, dan *YouthCare*.

Rumah Zakat Indonesia memiliki berbagai program untuk menghimpun dana dari masyarakat atau *muzakki*, diantaranya sebagai berikut:

- a) Layanan jemput zakat gratis, sehingga tidak ada ruang dan waktu yang menghalangi *muzakki* untuk menunaikan zakat, infak, dan shadaqahnya. *Muzakki* dapat menghubungi *interaction centre* Rumah Zakat Indonesia (0815-7300-1555).

- b) Transfer zakat via ATM dapat memudahkan para *muzakki* dalam menunaikan kewajibannya dengan cepat.
- c) *Interaction centre* Rumah Zakat Indonesia (0815-7300-1555), Call Center (0804-100-1000, 021-8591-8020), email (welcome@rumahzakat.org), layanan pesan singkat melalui SMS Center 0815-7300-1555.
- d) Via kartu kredit, *muzakki* tidak harus datang langsung ke Rumah Zakat Indonesia, cukup memanfaatkan kartu kreditnya dengan mengirimkan sms berformat: nomor kartu batas masa berlaku jenis program jumlah donasi. Kemudian kirim ke sms center di nomor 0815-7300-1555.
- e) EDC setor tunai. Ketika *muzakki* berdonasi tunai melalui ZISco (ZIS consultant) dengan memanfaatkan fasilitas EDC (Electronic Data Capture).

Selain program penghimpunan di atas, berikut beberapa program penyaluran zakat pada Rumah Zakat Indonesia.

- a) Program EduCare melalui pemberian beasiswa kembalikan senyum anak bangsa, Kids learning center, pusat pengembangan potensi anak, sekolah gratis, pelatihan bagi guru, dan pendampingan sekolah.
- b) Healthcare berupa rumah bersalin gratis, layanan bersalin gratis, pengantaran mobil jenazah gratis, pengadaan mobil jenazah/ambulance gratis/mobil klinik, aksi layanan mobil klinik

keliling gratis, siaga sehat dan siaga pangan, dan khitanan masal.

c) YouthCare berupa program pengembangan kemandirian pemuda, program pendampingan keberdayaan masyarakat, program siaga bencana, program super qurban, water well, dan pengadaan ICD Center.

d) EcoCare, program ini dirancang Rumah Zakat Indonesia untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan melalui serangkaian kegiatan pembinaan secara terpadu dan kemitraan modal. EcoCare diterapkan dalam program kelompok kecil mandiri (KUKMI), yaitu program *qardul hasan* dengan jumlah investasi sebesar Rp 2.500.000/peserta KUKMI.

Sebagai lembaga pengelola dana zakat, berikut data keuangan operasional dana zakat pada Rumah Zakat periode 2012 – 2014.

Tabel 1
Data Keuangan Operasional Dana Zakat pada Rumah Zakat
Periode 2012-2014

Tahun	Output		Input	
	Terhimpun	Tersalurkan	Aktiva tetap	Biaya operasional
2012	Rp 82,553,076,345	Rp 19,951,487,449	Rp 34,044,631,662	Rp 20,334,174,109
2013	Rp 77,742,418,249	Rp 20,766,173,229	Rp 35,942,296,442	Rp 26,602,566,726
2014	Rp 80,596,311,461	Rp 80,361,168,606	Rp 5,274,085,517	Rp 30,045,857,446

Sumber: Data Diolah, 2016

2. Dompot Dhuafa

Dompot Dhuafa adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga). Dompot Dhuafa melakukan pengembangan pengelolaan bisnis sehingga pengelolaan dana ZIS dapat memberikan manfaat yang lebih luas baik secara kuantitas maupun inovasi program-programnya untuk masyarakat miskin.

Sebagai salah satu organisasi pengelola zakat ini, Dompot Dhuafa merupakan organisasi zakat tingkat nasional yang juga telah melakukan pengembangan organisasi ke level internasional. Hal ini ditandai dengan keberadaan 17 (tujuh belas) cabang di berbagai provinsi di Indonesia dan 4 (empat) cabang di luar negeri. Selain itu, dalam pelaksanaan penghimpunan, pengelolaan dan pendayagunaan Dompot Dhuafa juga memiliki Kantor Perwakilan baik di dalam maupun luar negeri. Dompot Dhuafa juga mengembangkan lembaga keuangan syariah atau BMT melalui program MPZ (Mitra Pengelola Zakat) dengan menggandeng 83 (delapan puluh tiga) BMT yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia.

Program pengelolaan dana ZIS pada Dompot Dhuafa sebagai berikut:

a. Program Penghimpunan

Program-program penghimpunan dana ZIS yang dilakukan Dompot Dhuafa diantaranya melalui:

- 1) Perbankan yang bekerja sama dengan bank syariah dan bank konvensional (setor tunai, ATM, internet banking, dan SMS banking)
- 2) Pembayaran tunai langsung ke kantor Dompot Dhuafa (kantor pusat, cabang, dan perwakilan)
- 3) Pelayanan jemput donasi dengan minimal nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

b. Pengelolaan Administrasi dan Keuangan

Dompot Dhuafa secara rutin membuat laporan-laporan pertanggungjawaban keuangan baik bulanan maupun tahunan.

Laporan-laporan tersebut rutin diterbitkan oleh Dompot Dhuafa di situs www.zakat.go.id.

c. Program Pendayagunaan

Dalam mendayagunakan dana yang terhimpun, Dompot Dhuafa mengelola program-program melalui Jaringan Dompot Dhuafa, yaitu:

- 1) Bidang Kesehatan: Klinik Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) dan Rumah Sehat Terpadu DD

- 2) Bidang Pendidikan: Sekolah SMART Ekselensia Indonesia, FIS Filial, Sekolah Guru Indonesia (SGI), Beastudi Indonesia, Makmal Pendidikan, Institut Kemandirian dan Kampus Umar Usman
- 3) Bidang Pengembangan Ekonomi: BMT Center, Pertanian Sehat Indonesia, Kampoeng Ternak Nusantara, Tebar Hewan Kurban, Karya Masyarakat Mandiri, Tabung Wakaf Indonesia dan Indonesia Magnificent Zakat (IMZ)
- 4) Bidang Pengembangan Sosial: Lembaga Pelayan Masyarakat, Migrant Institute, Disaster Management Center, Semesta Hijau, Corps Da'i.

Sebagai lembaga pengelola dana zakat, berikut data keuangan operasional dana zakat pada Dompot Dhuafa periode 2012 – 2014.

Tabel 2
Data Keuangan Operasional Dana Zakat pada Dompot Dhuafa
Periode 2012-2014

Tahun	Output		Input	
	Terhimpun	Tersalurkan	Aktiva tetap	Biaya operasional
2012	Rp 102,975,084,644	Rp 87,902,606,177	Rp 58,246,033,897	Rp 28,304,812,004
2013	Rp 29,160,849,417	Rp 108,862,904,766	Rp 199,317,350,137	Rp 44,925,361,031
2014	Rp 142,094,370,544	Rp 151,488,458,426	Rp 197,314,110,768	Rp 44,743,346,167

Sumber: Data Diolah, 2016

3. BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan/ organisasi pemerintah yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 dan memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan

menyalurkan zakat, infaq, shadaqah (ZIS) pada tingkat nasional serta menjadi regulator dan coordinator zakat nasional. BAZNAS merupakan organisasi pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Sebagai salah satu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia, keanggotaan BAZNAS terdiri atas unsur masyarakat (ulama, tenaga professional, dan tokoh masyarakat Islam) dan unsur pemerintah (ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua dengan masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

BAZNAS memiliki cabang di setiap provinsi, Kabupaten/Kota hingga kecamatan di Indonesia. Dalam hal ini, BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri Agama atas usulan gubernur setelah mendapatkan pertimbangan dari BAZNAS. Selain itu, BAZNAS juga memiliki organisasi yang membantu pengumpulan zakat yang dinamakan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) baik di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ wajib disetorkan ke BAZNAS, BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota.

Dalam pengelolaan dana zakat, berikut beberapa program yang dilakukan oleh BAZNAS:

a. Penghimpunan

Program-program penghimpunan dana ZIS yang dilakukan BAZNAS diantaranya, yaitu:

- 1) Zakat Via Payroll System
- 2) Zakat Via BizZakat
- 3) Zakat Via E-Card
- 4) Zakat Via Online Payment
- 5) Zakat Layanan Perbankan Syariah
- 6) Jemput Zakat
- 7) Unit Pengumpul Zakat

b. Pengelolaan Administrasi dan Keuangan

BAZNAS yang merupakan lembaga pengelola zakat yang resmi sebagai organisasi pemerintah mengharuskan BAZNAS memberikan laporan pertanggungjawaban baik kepada muzakki, pemerintah, instansi-instansi terkait dan masyarakat luas. BAZNAS rutin membuat laporan-laporan pertanggungjawaban yang terdiri dari Laporan Pertanggungjawaban tahunan, bulanan, dan Laporan Rekapitulasi Muzakki dan Mustahik yang diterbitkan oleh BAZNAS di situs resmi BAZNAS yaitu

www.pusat.baznas.go.id

c. Program Pendistribusian dan Pendayagunaan

Dana ZIS yang terhimpun oleh BAZNAS untuk selanjutnya dikelola dengan baik. Dalam melakukan pendistribusian dan pendayagunaannya, BAZNAS membagi lima bidang, yaitu:

- 1) Bidang Kesehatan: Rumah Sehat BAZNAS yang terletak di Jakarta, Yogyakarta, dan Makassar.
- 2) Bidang Pendidikan: Rumah Cerdas Anak Bangsa (RCAB)
- 3) Bidang Ekonomi: Program Zakat Community Development (ZCD) dan Rumah Makmur BAZNAS (RMB)
- 4) Bidang Sosial: Konter Layanan Mustahik (KLM) dan Program Tanggap Bencana
- 5) Bidang Dakwah: Rumah Dakwah BAZNAS.

Sebagai lembaga pengelola dana zakat, berikut data keuangan operasional dana zakat pada BAZNAS periode 2012 – 2014.

Tabel 3
Data Keuangan Operasional Dana Zakat pada BAZNAS
Periode 2012-2014

Tahun	Output		Input	
	Terhimpun	Tersalurkan	Aktiva tetap	Biaya operasional
2012	Rp 40,387,972,224	Rp 41,032,862,774	Rp 22,105,699,106	Rp 3,853,478,229
2013	Rp 50,741,735,331	Rp 51,098,663,503	Rp 27,981,168,230	Rp 4,376,122,113
2014	Rp 50,651,633,442	Rp 51,189,655,449	Rp 39,861,217,129	Rp 4,376,122,076

Sumber: Data Diolah, 2016

4. Pos Kemanusiaan Peduli Ummat (PKPU)

PKPU adalah Lembaga Kemanusiaan Nasional yang secara konsisten membantu masyarakat yang mengalami kesulitan, seperti bencana alam, kelaparan, korban perang, penyakit berkepanjangan, dan lainnya. PKPU mengawali kiprahnya sejak tahun 1999 dengan membantu korban kerusuhan Ambon. Kemudian memperoleh otoritas sebagai lembaga pengelola dana local (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf) secara nasional pada tahun 2001 dari Pemerintah Republik Indonesia melalui SK Menag RI No. 44 Tahun 2001.

a. Pengumpulan Dana dan Bantuan Masyarakat

- 1) Zakat, infaq, shodaqoh (ZIS) dan wakaf serta dana CSR Perusahaan
- 2) Dana khusus bencana kemanusiaan
- 3) Pakaian, bahan makanan (sembako) dan obat-obatan.
- 4) Dana hewan kurban

b. Misi Penyelamatan Kemanusiaan

- 1) Daerah-daerah bencana alam dan kemanusiaan
- 2) Daerah kritis dan minus

c. Rehabilitasi Kemanusiaan

- 1) Rehabilitasi fasilitas kesehatan dan air bersih
- 2) Rehabilitasi fasilitas pendidikan
- 3) Rehabilitasi fasilitas ibadah
- 4) Rehabilitasi fasilitas ekonomi

- 5) Pembangunan Masyarakat
- 6) Pemberdayaan ekonomi umat
- 7) Pendidikan alternatif
- 8) Pembangunan pelayanan kesehatan mandiri
- 9) Distribusi hewan kurban.

Dalam penyaluran dana zakat PKPU memiliki beberapa program. Program tersebut secara garis besar terdiri dari empat bidang, yaitu:

- a. Program Pendidikan: Sekolah Berbasis Komunitas (SBK) dan kearifan lokal, Beasiswa Peduli Generasi, Perpustakaan keliling, Bedah Sekolah
- b. Program Ekonomi
 - 1) Bina Ternak Qurban (Binter-Qu)
 - 2) Kelompok Swadaya Mustahiq (KSM)
 - 3) Koperasi Bina Usaha Sejahtera (Busra)
- c. Program Kesehatan
 - 1) Ibu Sadar Gizi (BUDARZI)
 - 2) Program Komunitas Sehat
 - 3) Program Komunitas Hijau
- d. Rescue dan Recovery
 - 1) Rescue, dalam bentuk evakuasi korban, penanganan pengungsi, pendirian posko kesehatan, rumah darurat, sekolah darurat, dan pendampingan pasca bencana

2) Recovery

- a) Membantu mendirikan kembali sarana dan prasarana yang rusak (dari mulai jalan sampai sekolah).
- b) Membantu memulihkan korban paska bencana memberikan perawatan kesehatan lanjut dan pemeriksaan kesehatan secara berkala, mendirikan saat pendidikan darurat memberikan pendalaman rohani kepada korban bencana.
- c) Pemberian modal usaha bagi korban bencana.

Sebagai lembaga pengelola dana zakat, berikut data keuangan operasional dana zakat pada PKPU periode 2012 – 2014.

Tabel 4
Data Keuangan Operasional Dana Zakat pada PKPU
Periode 2012-2014

Tahun	Output		Input	
	Terhimpun	Tersalurkan	Aktiva tetap	Biaya operasional
2012	Rp 35,721,419,668	Rp 27,956,816,551	Rp 54,905,336,202	Rp 11,927,046,036
2013	Rp 34,626,043,597	Rp 32,623,738,342	Rp 17,363,096,379	Rp 17,900,843,225
2014	Rp 40,133,631,707	Rp 34,227,561,726	Rp 17,931,473,135	Rp 21,767,465,108

Sumber: Data Diolah, 2016

5. Baitul Maal Hidayatullah (BMH)

Baitul Maal Hidayatullah (BMH) berdiri seiring dengan berdirinya Pondok Pesantren Hidayatullah yang mulanya bertugas mendanai kebutuhan-kebutuhan pesantren. BMH merupakan lembaga

yang mempunyai fungsi untuk mengelola dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf, maupun hibah umat.

BMH merupakan salah satu lembaga yang dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional berdasarkan SK Menag RI No. 538 tahun 2001 sehingga telah secara legal berhak menghimpun dana masyarakat (zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah) dan menyalurkannya kepada masyarakat yang berhak menerimanya sesuai syariah.

Beberapa program dan layanan BMH, sebagai berikut:

a. Bidang Pendidikan

1) BERPADU (Beasiswa Peduli Anak Dhuafa)

a) Program ini memberikan bantuan kepada anak-anak yatim yang tidak mampu.

b) Pada masing-masing daerah ada coordinator yang bertanggung jawab terhadap pelaporan keuangan dan pembinaan anak asuh

2) PPAS (Pusat Pendidikan Anak Soleh): Memberikan beasiswa kepada anak yatim dan tidak mampu yang dinamakan Yayasan Ar-Rohma Putri. Seluruh kebutuhan pendidikan, makan, dan asrama ditanggung oleh BMH.

3) PSD (Pengembangan Sekolah Dhuafa)

- a) Program ini memberikan bantuan untuk pengembangan sekolah baik pengembangan fisik maupun kualitas sumber manusia (tenaga pengajar)
- b) Sekolah yang memperoleh PSD merupakan sekolah yang memiliki visi pengembangan Islam secara *kaffah*.

b. Bidang Dakwah

1) Dambaan (Da'I Membangun Negeri)

- a) Program ini dilakukan dengan mengirim da'i-da'i yang tergabung dalam tim da'I BMH dan tim da'I Hidayatullah untuk memberikan pembinaan kepada warga muslim, terutama yang berada di daerah rawan pemurtadan.
- b) Para da'i rutin mendapatkan pembinaan dan pembekalan sebagai alat dan bahan untuk berdakwah. Selain itu juga dibina di pesantren secara berkala untuk meningkatkan kualitas dan sinergi dakwah.

2) BIM (Bina Iman Muslim)

- a) Memberikan pembinaan agama kepada sesama lapisan masyarakat yang membutuhkan
- b) Pembinaan ini ditujukan secara umum kepada masyarakat muslim, baik di perkantoran, perumahan kota dan desa

- c) BMH memfasilitasi ketersediaan tenaga Pembina yang telah berpengalaman dalam dunia dakwah. BMH juga melayani kebutuhan tenaga khotib jumat

c. Bidang Sosial

1) Sapa Gakin (Santunan Peduli Keluarga Miskin)

- a) Santunan yang diberikan oleh BMH kepada orang miskin secara rutin dan insidental

- b) Bantuan dapat berupa sembako dan baju layak pakai

2) KBN (Kurban Berkah Nusantara)

Kurban berkah merupakan program penghimpunan hewan kurban dari masyarakat muslim untuk kemudian disalurkan ke daerah miskin

3) IMS (Islamic Medical Service)

Layanan ini dimaksudkan untuk meringankan kalangan dhuafa mendapatkan perawatan dan pengobatan masal, khitanan masal, dan klinik sehat.

d. Bidang Ekonomi

1) TERSENYUM (Ternak Sejahterakan Umat)

- a) Pemberdayaan ekonomi umat melalui penggemukan ternak dari program Hibah Ternak Tunai (HTT)

- b) Bagi hasil untuk BMH berupa ternak kembali sehingga memberi manfaat berlipat ganda

2) BAHAGIA (Bantuan Usaha Keluarga Dhuafa)

- a) Memberikan bantuan modal usaha bagi keluarga dhuafa yang telah memiliki usaha namun sulit berkembang karena kekurangan modal
- b) Pinjaman bersifat qardul hasal tidak ada bagi hasil akan tetapi peminjam diharapkan berinfaq sebulan sekali
- c) Mengadakan pelatihan-pelatihan kewirausahaan bagi pelaku usaha kecil.

Sebagai lembaga pengelola dana zakat, berikut data keuangan operasional dana zakat pada BMH periode 2012 – 2014.

Tabel 5
Data Keuangan Operasional Dana Zakat pada BMH
Periode 2012-2014

Tahun	Output		Input	
	Terhimpun	Tersalurkan	Aktiva tetap	Biaya operasional
2012	Rp 17,565,491,229	Rp 17,581,212,386	Rp 1,492,575,106	Rp 12,251,510,096
2013	Rp 14,852,238,580	Rp 11,881,574,821	Rp 2,325,001,347	Rp 11,222,867,587
2014	Rp 22,052,492,137	Rp 20,457,236,501	Rp 6,090,582,240	Rp 20,683,844,268

Sumber: Data Diolah, 2016

Berdasarkan gambaran umum kelima OPZ tersebut menyatakan bahwa kelima OPZ tersebut sudah berupaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan berperan penting pada perekonomian Negara. Penyebaran dan pendirian kantor-kantor cabang setiap OPZ hampir di seluruh daerah Indonesia sebagai perwakilan masing-masing OPZ merupakan wujud dari upaya kelima OPZ untuk berperan penting dalam mencapai salah satu misinya pada Negara yaitu menekan tingkat kemiskinan.

B. Hasil Analisis

1. Analisis Tingkat Efisiensi Kinerja Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia

Penelitian ini menggunakan software DEAP 2.1 dengan pendekatan *Variabel Return to Scale* (VSR). Pengukuran efisiensi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) didasarkan pada orientasi output, dengan mengukur output dan input yang ada. Tujuannya untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam menghimpun dana zakat dan menyalurkannya dengan sejumlah input tertentu (orientasi output).

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dikatakan efisiensi apabila nilainya mencapai angka 100% atau setara dengan 1. Semakin ia menjauh dari angka 100% atau mendekati angka 0%, maka akan semakin tidak efisiennya organisasi pengelola zakat tersebut.¹ Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dinilai memiliki kinerja yang tinggi apabila dapat meningkatkan efisiensinya dengan penggunaan variable-variabel yang sesuai untuk memberikan hasil yang maksimal.

Berikut hasil pengolahan variabel input dan output dengan software DEAP 2.1, yang menunjukkan tingkat efisiensi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dari tahun 2012-2014.

¹Nasher Akbar, *Analisis Efisiensi...*, hlm. 774.

a. Tingkat efisiensi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) 2012

Tabel 6
Tingkat Efisiensi OPZ 2012

OPZ	<i>Efficiency Summary</i>
Rumah Zakat	1.000
Dompot Dhuafa	1.000
BAZNAS	1.000
PKPU	0.585
BMH	1.000
<i>Mean</i>	0.917

Sumber: Data diolah dari halaman 75 – 88.

Tabel 4.6 menunjukkan nilai efisiensi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia. Maka berdasarkan hasil pengolahan data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2012 terdapat empat Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang kinerjanya dikatakan efisien dengan nilai efisiensi optimum mencapai 100% atau setara dengan 1, yang mana empat Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) terdiri dari Rumah Zakat, Dompot Dhuafa, BAZNAS, dan BMH. Sedangkan, PKPU dapat dikatakan belum efisien, yang mana hal ini disebabkan oleh nilai efisiensinya belum mencapai 100% atau setara dengan 1, nilai efisiensi yang dicapai oleh PKPU hanya sampai batas 0.585.

Berdasarkan tingkat efisiensi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Indonesia diatas, dapat disimpulkan bahwa keempat Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) pada tingkat efisiensi tersebut diatas atau yang merupakan dominan dibandingkan dengan

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) pada tingkat yang belum mencapai efisien. Maka Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) pada tingkat efisien dapat menutupi atau mewakili satu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang belum mencapai tingkat efisiensi kinerjanya. Sehingga pada tahun 2012 Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia dapat dikatakan mendekati tingkat efisiensi optimum dengan nilai mencapai 100% atau setara dengan 1, yang mana tingkat rata-rata efisiensi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia pada tahun 2012 mencapai nilai 0.917 atau hampir mencapai tingkat efisiensi senilai 1.

b. Tingkat efisiensi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) 2013

Tabel 7
Tingkat Efisiensi OPZ 2013

OPZ	<i>Efficiency Summary</i>
Rumah Zakat	1.000
Dompet Dhuafa	1.000
BAZNAS	1.000
PKPU	0.957
BMH	1.000
<i>Mean</i>	0.991

Sumber: Data diolah dari halaman 75 – 88.

Tabel 4.7 menunjukkan nilai efisiensi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia. Maka berdasarkan hasil pengolahan data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2013 terdapat empat Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang kinerjanya dikatakan efisien dengan nilai efisiensi optimum

mencapai 100% atau setara dengan 1, yaitu terdiri dari Rumah Zakat, Dompot Dhuafa, BAZNAS dan BMH. Sedangkan, satu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) lainnya dapat dikatakan tingkat efisiennya mendekati angka minimum 100% atau setara dengan 1, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) tersebut adalah PKPU dengan nilai efisiensi sebesar 0.957.

Berdasarkan tingkat efisiensi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Indonesia diatas, dapat disimpulkan bahwa keempat Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) pada tingkat efisiensi tersebut diatas atau yang merupakan dominan dibandingkan dengan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) pada tingkat yang belum mencapai tingkat efisiensi kinerjanya. Maka Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) pada tingkat efisien dapat menutupi atau mewakili Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang belum mencapai tingkat efisiensi kinerjanya. Sehingga pada tahun 2013 Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia dapat dikatakan mencapai tingkat efisiensi optimum dengan nilai 100% atau setara dengan 1, yang mana tingkat rata-rata efisiensi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia pada tahun 2013 mencapai nilai 0.991 atau hampir mencapai tingkat efisiensi senilai 1.

c. Tingkat efisiensi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) 2014

Tabel 8
Tingkat Efisiensi OPZ 2014

OPZ	<i>Efficiency Summary</i>
Rumah Zakat	1.000
Dompot Dhuafa	1.000
BAZNAS	1.000
PKPU	0.563
BMH	1.000
<i>Mean</i>	0.913

Sumber: Data diolah dari halaman 75 – 88.

Tabel 4.8 menunjukkan nilai efisiensi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia. Maka berdasarkan hasil pengolahan data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2014 terdapat empat Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang kinerjanya dikatakan efisien dengan nilai efisiensi optimum mencapai angka 100% atau setara dengan 1, dan satu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang kinerjanya dikatakan tingkat efisiennya belum mencapai angka minimum 100% atau setara dengan 1.

Keempat Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang kinerjanya dikatakan efisien dengan nilai efisiensi optimum mencapai angka 100% atau setara dengan 1 terdiri dari Rumah Zakat, Dompot Dhuafa, BAZNAS, dan BMH. Dan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang kinerjanya dikatakan belum mencapai tingkat efisien yaitu PKPU.

Berdasarkan tingkat efisiensi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Indonesia diatas, dapat disimpulkan bahwa keempat Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) pada tingkat efisiensi tersebut diatas atau yang merupakan dominan dibandingkan dengan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) pada tingkat yang belum mencapai tingkat efisiensi kinerjanya. Maka Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) pada tingkat efisien dapat menutupi atau mewakili Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang belum mencapai tingkat efisiensi kinerjanya. Sehingga pada tahun 2014 Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia dapat dikatakan mendekati tingkat efisiensi optimum dengan nilai mencapai angka 100% atau setara dengan 1, yang mana tingkat rata-rata efisiensi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia pada tahun 2014 mencapai nilai 0.913 atau hampir mencapai tingkat efisiensi senilai 1.

Kesimpulan yang dapat dilihat dari ketiga data olahan tingkat efisiensi kinerja OPZ dari tahun 2012 sampai 2014 adalah rata-rata (*mean*) efisiensi dari OPZ tersebut dalam waktu tiga tahun.

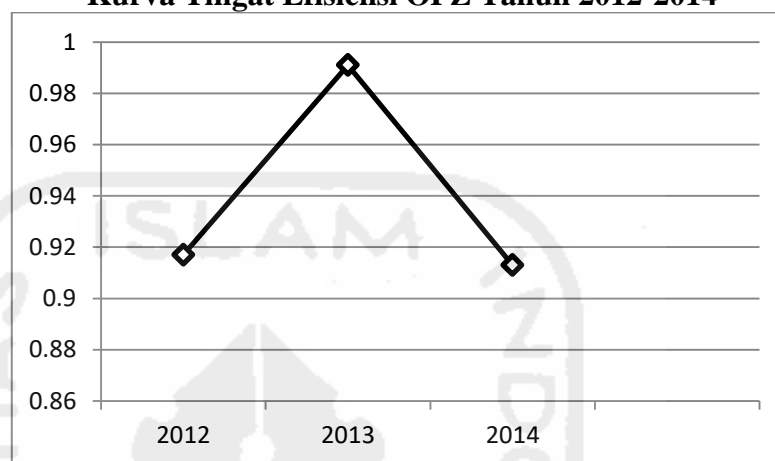
Tabel 9
Rata-Rata Tingkat Efisiensi OPZ
Periode 2012-2014

Tahun	Mean
2012	0.917
2013	0.991
2014	0.913

Sumber: Data diolah, dari halaman 88 – 91.

Berdasarkan tabel 4.9 dapat disimpulkan dalam bentuk kurva berikut ini:

Gambar 10
Kurva Tingkat Efisiensi OPZ Tahun 2012-2014



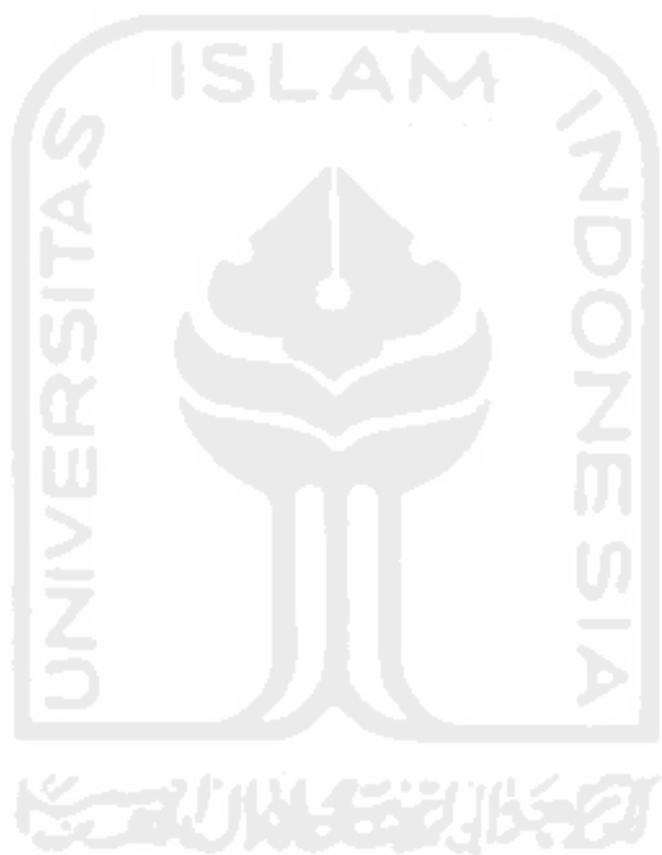
Sumber: Data diolah, dari halaman 88 – 91.

Berdasarkan kurva tersebut dijelaskan bahwa tingkat efisiensi kinerja Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia pada tahun 2013 cenderung lebih mendekati nilai optimum efisiensi dibanding dengan tahun 2012 dan 2014. Pada tahun 2013 tingkat efisiensi kinerja Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia hampir mendekati tingkat efisiensi optimum dengan nilai mencapai angka 100% atau setara dengan 1, yaitu mencapai nilai 0.991, dibandingkan dengan tahun 2012 dan 2014 tingkat efisiensi kinerja Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia mencapai nilai 0.917 dan 0.913.

Hasil pengolahan data keuangan kelima OPZ dari tahun 2012 sampai pada tahun 2014 menunjukkan bahwa terdapat empat OPZ yang mencapai tingkat nilai efisiensi yang optimum (100% atau setara dengan 1). Keempat OPZ menunjukkan tingkat nilai efisiensi yang







setara dengan 1. Tabel tersebut juga menunjukkan tidak adanya target perbaikan terhadap variabel input, artinya variabel input pada OPZ tersebut pada posisi yang tepat.

Berdasarkan tabel 10, tabel 11, dan tabel 12 diatas menunjukkan bahwa Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang belum mencapai tingkat efisiensi optimum dengan nilai 100% atau setara dengan 1, maka perhitungan efisiensi dengan DEA memberikan target perbaikan, yang mana target perbaikan tersebut didasarkan pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang efisien, sehingga Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang belum mencapai tingkat efisiensi optimum melalui perbaikan tersebut dapat meningkatkan tingkat nilai efisiensinya hingga sampai pada tingkat nilai efisiensi optimum.

Data yang telah diolah dengan DEA menunjukkan adanya Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia yang belum dan yang sudah mencapai tingkat efisiensi optimum dengan nilai 100% atau setara dengan 1. Data tersebut juga menunjukkan target yang harus dicapai oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia yang belum mencapai tingkat efisiensi optimum, artinya bahwa Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia yang belum mencapai tingkat efisiensi optimum disebabkan oleh tidak seimbangnya dana yang terhimpun dan dana yang tersalurkan pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia.

2. Analisis Implikasi Efisiensi Kinerja Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Kemiskinan menjadi salah satu problematika yang senantiasa mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Berbagai program dilakukan dalam rangka menekan angka kemiskinan. Sejauh ini, diketahui bahwa gap antara kaya dan miskin semakin terlihat. Meskipun berbagai upaya dilakukan pemerintah, namun senyatanya masih banyak masyarakat yang belum memperoleh kehidupan yang layak karena masih berada di bawah garis kemiskinan.

Berkaitan dengan tingkat kemiskinan, diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2012 mencapai 29,13 juta orang (11,96%), berkurang 0,89 juta orang (0,53%) dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2011 yang sebesar 30,02 juta orang (12,49%).² Pada bulan September 2013, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,55 juta orang (11,47%), bertambah sebanyak 0,48 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2013 yang sebanyak 28,07 juta orang (11,37%).³

Pada September 2014, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 27,73 juta orang (10,96%), berkurang sebesar

²Berita Resmi Badan Pusat Statistik (BPS) No. 45/07/Th. XV, 2 Juli 2012, hlm. 1.

³Berita Resmi Badan Pusat Statistik (BPS) No. 06/01/Th. XVII, 2 Januari 2014, hlm. 1.

0,55 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2014 yang sebesar 28,28 juta orang (11,25%), dan berkurang sebesar 0,87 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2013 yang sebesar 28,60 juta orang (11,46%).⁴ Penurunan ini terjadi sebelum Pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM pada November 2014.

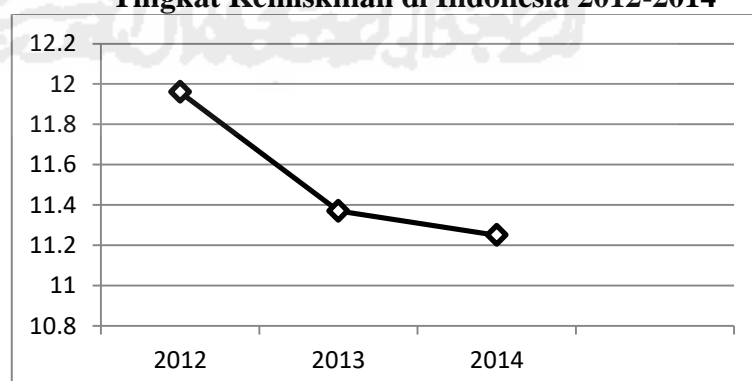
Tabel 13
Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2012-2014

Tahun	Tingkat Kemiskinan
2012	11,46%
2013	11,37%
2014	11,25%

Sumber: Data diolah dari BPS 2012-2014

Berdasarkan tabel 13 dapat diketahui bahwa terjadinya perubahan tingkat kemiskinan di Indonesia dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Berikut kurva yang menggambarkan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Gambar 11
Tingkat Kemiskinan di Indonesia 2012-2014



Sumber: Kurva diolah dari data BPS 2012-2014

⁴Berita Resmi Badan Pusat Statistik (BPS) No. 06/01/Th. XVIII, 2 Januari 2015, hlm. 1.

Dari kurva tersebut dijelaskan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia dari tahun 2012 sampai tahun 2014 mengalami penurunan yang signifikan. Karena pada tahun 2012 sampai tahun 2013 tingkat kemiskinan menurun sebanyak 0.59%, dan pada tahun 2013 sampai tahun 2014 tingkat kemiskinan menurun sebanyak 0.12%. Artinya, penurunan tingkat kemiskinan tersebut adalah hasil usaha dari kebijakan pemerintah pada kemiskinan.

Secara umum pada periode tahun 2012 sampai tahun 2014 tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan kecuali pada September 2013. Pada September 2013 jumlah dan persentase penduduk miskin mengalami kenaikan dibanding Maret 2013 yang disebabkan oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga BBM pada Juni 2013. Selanjutnya pada periode September 2013 sampai September 2014 jumlah dan persentase penduduk miskin kembali mengalami penurunan.

Berdasarkan perhitungan tingkat efisiensi kinerja Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia pada tahun 2012 sampai tahun 2104 dengan DEA, menyatakan bahwa Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia telah mencapai tingkat efisiensi meskipun belum mencapai tingkat efisiensi optimumnya yaitu pada nilai 100% atau setara dengan 1.

Untuk dapat mengetahui gambaran ringkas mengenai efisiensi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dan tingkat kemiskinan di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 14
Rekapitulasi Tingkat Efisiensi OPZ dan Kemiskinan di Indonesia
Periode 2012-2014

Tahun	Tingkat Efisiensi	Tingkat Kemiskinan
2012	91.7%	11.46%
2013	99.1%	11.37%
2014	91.3%	11.25%

Sumber: Data diolah dari halaman 95 dan 102.

Tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2012 sampai pada tahun 2014, menunjukkan adanya penurunan tingkat kemiskinan yang signifikan. Jika tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2012 sampai tahun 2014 menurun dan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia telah mencapai tingkat efisiensi kinerjanya, artinya bahwa pengelolaan zakat yang efisien berimplikasi pada tingkat penurunan kemiskinan. Sebagaimana diketahui bahwa zakat merupakan salah satu instrumen keuangan yang pengelolaannya ditunjukkan untuk mengentaskan kemiskinan.

Efisiensi yang diperoleh oleh OPZ pada penelitian ini merupakan perhitungan yang didasari pada rasio input dan output sebagai variabel independen yang kemudian digunakan untuk mengetahui implikasinya terhadap tingkat kemiskinan sebagai variabel dependen pada penelitian ini. Berdasarkan rasio input dan output, dikatakan efisien apabila dengan input yang sama dapat menghasilkan

output yang lebih besar. Sebagaimana pada penelitian ini diketahui bahwa nilai input kelima OPZ dengan besaran yang sama dapat melakukan penghimpunan dan penyaluran dana zakat sesuai dengan program yang telah dilakukan.

Selain itu, kelima OPZ ini memiliki input yang kecil namun dapat menghasilkan output yang sama baik dana yang terhimpun maupun dana tersalurkan. Faktor selanjutnya yaitu dengan input yang lebih besar maka dapat menghasilkan output yang lebih besar lagi. Artinya bahwa kelima OPZ ini mampu memiliki input baik berupa aktiva maupun biaya operasional yang besar, maka dapat menghasilkan output yang terdiri dari dana terhimpun dan dana tersalur yang lebih besar juga.

Berdasarkan faktor rasio input dan output di atas, maka dapat diketahui bahwa kelima OPZ tersebut telah dinilai efisien dengan nilai efisiensi mendekati 1 (satu). Tingkat efisien tersebut mengindikasikan bahwa adanya upaya para OPZ dalam mencapai salah satu tujuannya yaitu mengentaskan kemiskinan yang secara struktural bersinergi dengan beberapa unsur lainnya baik pemerintah maupun masyarakat.

Parameter pengukuran efisiensi pada lembaga dalam hal ini OPZ berdasarkan beberapa faktor, yaitu *pertama* efisien karena arbitrase informasi. Kelima OPZ tersebut telah secara efisien dalam memperoleh informasi yang berkembang terkait pendayagunaan zakat secara optimal dan disesuaikan dengan program-program yang dibentuk

agar mampu mengoptimalkan penghimpunan dan penyaluran dana zakat.

Kedua, efisiensi karena ketepatan dalam menilai aset-asetnya. Dalam hal ini kelima OPZ telah melaporkan aset-aset yang dimilikinya dalam laporan keuangan secara berkala dan dipublikasikan. Sehingga besaran aset yang dimilikinya dapat diketahui untuk kemudian menjadi item dalam menilai tingkat efisiensinya serta dapat dialokasikan secara efisien dalam kegiatan operasionalnya.

Ketiga, efisiensi karena lembaga mampu mengantisipasi risiko yang muncul. OPZ sebagai lembaga pengelola zakat tentunya sangat rentan dengan risiko yang muncul seperti dana yang disalurkan tidak produktif, penerima dana sesuai dengan ketentuannya, dan lain-lain. Dalam hal ini, kelima OPZ dinilai telah efisien dalam meminimalisir risiko yang muncul sebagaimana program-program yang dibentuk dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat telah jelas dan berjalan secara berkelanjutan.

Keempat, efisiensi dalam administrasi. Kelima OPZ dinilai telah efisien dalam bidang administrasi dimana kelimanya telah mencatat data operasional dan keuangan secara baik dibuktikan dengan data administrasi telah dipublikasikan secara periodik khususnya pada *website* masing-masing OPZ.

Keempat parameter di atas telah menunjukkan bahwa OPZ yang menjadi sampel pada penelitian ini telah efisien dalam operasionalnya.

Pengelolaan zakat secara efisien yang dilakukan oleh OPZ berupa penghimpunan dana dengan berbagai program yang telah diupayakan dan disalurkan secara dialogis di berbagai bidang sebagaimana yang dilakukan oleh kelima OPZ tersebut, menunjukkan adanya implikasi terhadap penekanan angka kemiskinan.

Tingkat kemiskinan yang semakin menurun setiap tahunnya, diindikasikan sebagai salah satu dari kontribusi pengelolaan zakat yang efisien. Kelima OPZ tersebut mewakili OPZ di Indonesia telah berkontribusi dalam perbaikan ekonomi secara nasional. Program-program tersebut akan terus berjalan dan berkelanjutan sebagai upaya mengoptimalkan peran dan fungsi zakat sebagai salah satu instrumen keuangan Islam yang memiliki kontribusi dalam pengentasan kemiskinan.

Sebagaimana diketahui bahwa pendayagunaan dana zakat untuk penanggulangan kemiskinan akan semakin optimal apabila adanya sinergitas yang baik antara pemerintah, OPZ, dan masyarakat. Dimana ketiga unsur ini secara bersama-sama bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan.

Kinerja OPZ yang telah mencapai tingkat efisiensinya dan program-program kerjanya berimplikasi atau memberi dampak yang baik dalam pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, dengan adanya tingkat efisiensi kinerja OPZ di atas, maka OPZ sebagai bagian dari pihak yang berkepentingan dalam pengumpulan, pendistribusian,

pendayagunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan dana zakat telah memberikan kontribusi dengan kinerja yang efisien untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia.

